



## Panduan Singkat tentang Pasal 307 Undang-Undang Tarif AS tahun 1930

Pasal 307 Undang-Undang Tarif Amerika Serikat (AS) tahun 1930 melarang impor ke AS barang-barang yang dibuat dengan menggunakan kerja paksa. Siapa pun – organisasi non-pemerintah, pengacara, serikat pekerja, jurnalis investigasi, dan individu baik di dalam maupun di luar AS– dapat mengajukan petisi untuk memohon undang-undang perdagangan AS untuk memberantas kerja paksa di negara mereka. Panduan ini menyediakan gambaran umum tentang komponen-komponen petisi Pasal 307, termasuk jenis bukti yang diperlukan, di mana dan bagaimana mengajukan petisi, sumber informasi pendukung tambahan yang disarankan, dan standar peninjauan.<sup>i</sup>

### ISTILAH & DEFINISI UTAMA

- **Pasal 307 Undang-Undang Tarif AS:** Undang-Undang Tarif melarang impor ke AS barang-barang apa pun yang dibuat “secara keseluruhan atau sebagian” dengan menggunakan kerja paksa, kerja terikat, atau kerja narapidana, di wilayah mana pun di dunia. “**Semua barang, barang dagangan, bagian dari barang dan barang jadi, ditambang, diproduksi, atau dimanufaktur secara keseluruhan atau sebagian di negara asing mana pun oleh narapidana atau/dan kerja paksa atau/dan kerja terikat di bawah sanksi pidana tidak berhak masuk di pelabuhan manapun di Amerika Serikat, dan impornya dengan demikian dilarang, dan Menteri Keuangan berwenang dan diarahkan untuk menetapkan peraturan-peraturan yang mungkin diperlukan untuk menegakkan ketentuan ini.**”<sup>ii</sup>
- **Perintah Penahanan Pelepasan/Withhold Release Order (WRO):** Pasal 307 diimplementasikan oleh Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS/ *U.S. Customs and Border Protection* (CBP). CBP memiliki kekuasaan untuk menerbitkan *Withhold Release Order* (WRO) yang merupakan instruksi kepada Petugas Bea Cukai AS untuk mencegah impor-impor memasuki AS terkait bukti yang “wajar tetapi tidak bulat kesimpulannya” bahwa kerja paksa digunakan dalam produksi barang-barang di luar negeri. Barang-barang yang menjadi perhatian WRO akan ditahan di semua pelabuhan AS.
- **Kerja Paksa Berdasarkan Pasal 307:** Seluruh pekerjaan atau pelayanan yang dituntut dari setiap orang yang dirinya terancam mendapat berbagai bentuk hukuman ketika pekerjaannya tidak terlaksana dan untuk itu pekerja tidak menawarkan dirinya secara sukarela.<sup>iii</sup> Definisi ini juga sangat mencerminkan definisi kerja paksa di bawah Konvensi Kerja Paksa Organisasi Buruh Internasional (ILO), 1930 (No. 29). Faktanya, semua bukti yang diajukan berdasarkan Pasal 307 secara khusus dievaluasi berdasarkan 11 indikator<sup>iv</sup> kerja paksa ILO. Hal-hal itu adalah: penyalahgunaan kerentanan, penipuan, pembatasan gerak, isolasi, kekerasan fisik dan seksual, intimidasi dan ancaman-ancaman, penahanan dokumen-dokumen identitas, pemotongan upah, jerat utang, kondisi kerja dan hidup yang tidak layak dan lembur yang berlebihan.
- **Kerja Terikat:** Pasal 307 juga melarang kerja terikat. Kerja terikat berdasarkan Undang-Undang Tarif mengacu pada jerat utang<sup>v</sup> dan peonase<sup>vi</sup>, keduanya didefinisikan berdasarkan undang-undang AS. Untuk tujuan pasal ini, istilah “kerja paksa atau/dan kerja terikat” juga mencakup pekerja anak yang dipaksa atau terikat kontrak.<sup>vii</sup>
- **Kerja Narapidana:** Pasal 307 juga melarang impor barang yang dibuat dengan menggunakan tenaga kerja narapidana atau penjara di luar negeri tanpa pengecualian.

### KOMPONEN INTI DARI PETISI

CBP tidak memerlukan format petisi tertentu tetapi memiliki beberapa persyaratan untuk isinya. Secara khusus, petisi harus memuat, atau disertai dengan:

1. Pernyataan lengkap tentang alasan atas keyakinan bahwa barang tersebut dibuat dengan kerja paksa;
2. Uraian rinci atau contoh barang/barang dagangan; dan,
3. Semua fakta terkait yang dapat diperoleh mengenai produksi barang dagangan di luar negeri serta bukti barang-barang tersebut memasuki pasar AS.

**\*Petunjuk Praktik:** Sebuah foto label di atas sebuah kemasan dalam sebuah pabrik yang dioperasikan oleh produsen dapat mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk mendukung petisi. Sebagai contoh, label alamat dapat memberikan informasi tentang barang, tujuan, dan sumber awalnya.

## JENIS BUKTI YANG DIBUTUHKAN

Advokat harus menyertakan bukti dalam petisi mereka yang menunjukkan bahwa suatu barang 1) dibuat dengan kerja paksa, dan 2) akan diimpor ke Amerika Serikat. Pemohon tidak perlu menyertakan setiap indikator atau jenis bukti yang secara bulat menyimpulkan, tetapi *setidaknya* sebuah permohonan *harus menyertakan bukti yang memperkuat kedua unsur hukum: terancam hukuman dan ketidaksukarelaan*. Bukti dalam petisi harus diklasifikasikan ke dalam berbagai indikator kerja paksa ILO. Dan petisi juga harus menunjukkan bahwa ada **keyakinan yang masuk akal** bahwa **barang-barang yang dipermasalahkan memasuki AS**.<sup>viii</sup>

Sumber bukti utama meliputi: 1) wawancara langsung pekerja; 2) bukti dokumenter seperti kontrak kerja, slip gaji dan foto atau video tempat kerja dan/atau tempat tinggal. Disarankan agar semua informasi yang diajukan dalam petisi 307, termasuk bukti pendukung, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk mempercepat peninjauan CBP. Selain alat bukti primer, alat bukti pendukung juga penting untuk memperkuat tuduhan-tuduhan dalam petisi. Amat berguna untuk menyokong tuduhan-tuduhan tertentu tentang kerja paksa dengan mengutip laporan-laporan yang diterbitkan oleh organisasi non-pemerintah, lembaga pemerintah AS dan nasional lainnya, lembaga internasional (seperti Organisasi Buruh Internasional (ILO)), dan laporan media investigasi. Informasi tentang kerja paksa di sektor, negara, atau wilayah tertentu juga berguna.

## CARA MENGAJUKAN PETISI

Setiap organisasi atau individu dapat mengajukan petisi Pasal 307 kepada CBP tentang penggunaan kerja paksa di setiap tahap pembuatan, pemrosesan, atau penambangan barang yang diimpor ke A.S. Tidak ada batasan geografis untuk mencapai Pasal 307. Seseorang dapat mengajukan a petisi secara anonim, tetapi ini mempersulit tindak lanjut atas hasil petisi.<sup>ix</sup>

Ada dua cara untuk mengajukan petisi:

- Melalui laman di portal *e-allegation* CBP: <https://eallegations.cbp.gov/Home/allegation>
- Dengan mengirimkan email ke CBP di alamat: [forcedlabor@cbp.dhs.gov](mailto:forcedlabor@cbp.dhs.gov)

## TAHAP SELANJUTNYA

Setelah CBP menerima petisi, ia akan meninjau informasi yang disampaikan untuk menentukan apakah pengajuan tersebut memenuhi standar yang ditentukan dalam peraturan CBP. CBP juga akan meninjau petisi untuk mengidentifikasi indikator-indikator kerja paksa ILO. Penerimaan petisi saja tidak akan memicu WRO. Jika bukti yang memadai tentang kerja paksa diberikan, itu akan memicu penyelidikan yang lebih komprehensif oleh CBP, termasuk pencarian fakta tambahan untuk menguatkan tuduhan tersebut. Ini biasanya memakan waktu enam bulan atau lebih.<sup>x</sup> Investigasi dapat mencakup kontak lebih lanjut dengan pihak yang mengajukan (jika disebutkan) dan sumber-sumber pendukung yang teridentifikasi. *Lihat* 19 C.F.R. §12.42(d). Setelah badan tersebut yakin bahwa bukti yang disajikan memenuhi standar Pasal 307 Undang-Undang Tarif AS, badan tersebut dapat mengeluarkan perintah penahanan atau WRO, menutup masuknya barang yang dipermasalahkan di semua pelabuhan AS. Perintah-perintah ini dipublikasikan di halaman kerja paksa CBP.<sup>xi</sup>

Selain itu, perlu dicatat bahwa investigasi CBP terhadap kerja paksa berdasarkan Pasal 307 dianggap penegakan hukum yang sensitif dan oleh karena itu dilindungi dari pengungkapan terhadap publik dalam keadaan apa pun. Semua informasi yang disampaikan dalam petisi 307 akan diperlakukan sebagai rahasia.

## STANDAR TINJAUAN

Berdasarkan 19 C.F.R. §12.42 (e), jika dalam sewaktu-waktu CBP menemukan bahwa *informasi yang tersedia secara wajar tetapi tidak secara bulat menyimpulkan* indikasi bahwa barang-barang yang melanggar larangan Pasal 307 tentang kerja paksa sedang, atau kemungkinan besar, diimpor ke AS, maka CBP dapat mengeluarkan perintah penahanan atau WRO. Ambang batas pembuktian yang rendah ini membuat aplikasi ini cukup mudah diakses. Organisasi yang mengajukan petisi *hanya perlu menunjukkan bahwa bukti yang dimiliki cukup bagi seseorang yang berakal untuk menyimpulkan bahwa ada kerja paksa dalam produksi barang-barang yang dipermasalahkan*. Para pemohon tidak perlu menghadirkan bukti yang lengkap yang membuktikan penggunaan kerja paksa; meskipun, tentu saja, semakin banyak bukti yang dapat diberikan, semakin besar kemungkinan petisi akan berhasil.

## BANTUAN TEKNIS PADA PETISI

The Human Trafficking Legal Center memberikan bantuan teknis untuk petisi berdasarkan Pasal 307 Undang-Undang Tarif. Jika Anda ingin mengajukan petisi, silakan menghubungi The Human Trafficking Legal Center di [info@htlegalcenter.org](mailto:info@htlegalcenter.org). Panduan yang lengkap, *Importing Freedom: Using the U.S. Tariff Act to Combat Forced Labor in Supply Chains*, dapat ditemukan di situs The Human Trafficking Legal Center di [https://htlegalcenter.org/wp-content/uploads/Importing-Freedom-Menggunakan-U.S.-Tariff-Act-to-Combat-Forced-Labor-in-Supply-Chains\\_FINAL.pdf](https://htlegalcenter.org/wp-content/uploads/Importing-Freedom-Menggunakan-U.S.-Tariff-Act-to-Combat-Forced-Labor-in-Supply-Chains_FINAL.pdf)

---

<sup>i</sup> Untuk contoh pengajuan yang disarankan dan isi kuesioner, serta sumber-sumber tambahan untuk membantu memperkuat petisi ke Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS, silakan lihat laporan lengkap HTLC, *Importing Freedom*, tersedia di [https://htlegalcenter.org/wp-content/uploads/Mengimpor-Kebebasan-Menggunakan-U.S.-Tariff-Act-to-Combat-Forced - Buruh-dalam-Supply-Chains\\_FINAL.pdf](https://htlegalcenter.org/wp-content/uploads/Mengimpor-Kebebasan-Menggunakan-U.S.-Tariff-Act-to-Combat-Forced-Buruh-dalam-Supply-Chains_FINAL.pdf)

<sup>ii</sup> 19 U.S.C. § 1307

<sup>iii</sup> 19 U.S.C. § 1307; bahasa yang dibakukan pada Konvensi Kerja Paksa ILO, 1930; Lihat juga, *Apa itu Kerja Paksa, Perbudakan Modern dan Perdagangan Manusia, Organisasi Buruh Internasional*, tersedia di <https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/definition/lang--en/index.htm>

<sup>iv</sup> Untuk penjelasan tentang 11 indikator kerja paksa ILO, lihat [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---declaration/documents/publication/wcms\\_203832.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf)

<sup>v</sup> Yang dimaksud dengan "jerat utang" adalah status atau keadaan debitur yang timbul dari perjanjian oleh debitur atas jasa-jasa pribadinya atau atas orang-orang yang berada di bawah kendalinya sebagai jaminan utang, yang nilai jasa-jasa itu bila ditaksir secara wajar tidak diterapkan untuk penghapusan utang atau lamanya dan sifat dari jasa-jasa tersebut masing-masing tidak dibatasi dan didefinisikan. *Lihat* 22 U.S.C. § 7102(7).

<sup>vi</sup> "Peonase" didefinisikan sebagai "suatu kondisi kerja paksa di mana pelayan dipaksa untuk bekerja melawan kehendaknya untuk penghapusan beberapa hutang atau kewajiban yang nyata atau palsu." Lihat 42 U.S.C. § 1994.

<sup>vii</sup> Pekerja anak tidak diatur di bawah 19 U.S.C. § 1307 kecuali itu adalah pekerja anak paksa.

<sup>viii</sup> Informasi rantai pasokan dapat diperoleh dari data pabean yang tersedia untuk umum dan basis data langganan perdagangan.

<sup>ix</sup> Kami merekomendasikan pemohon untuk berkonsultasi dengan situs berikut untuk panduan tambahan sebelum mengajukan: <https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/forced-labor> dan <https://www.cbp.gov/trade/trade-community/e-allegations/e-allegations-faqs>

<sup>x</sup> Untuk tenggat waktu CBP dan tolak ukur investigasi berdasarkan 19 U.S.C. § 1307, Lihat:

<https://www.cbp.gov/document/fact-sheets/slick-sheet-cbp-timelines-and-investigative-benchmarks-forced-labor-petitions>

<sup>xi</sup> Untuk daftar semua tindakan-tindakan penegakan CBP yang diambil berdasarkan Pasal 307, Lihat

<https://www.cbp.gov/trade/forced-labor/withhold-release-orders-and-findings>